

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman. 1978,*Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia Dalam Rangka HANKAMNAS*,Pembangunan pada Seminar Hukum Pertanahan HKTI Jakarta 23
- _____ Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Rangka HANKAMNAS,Pembangunan pada Seminar Hukum Pertanahan HKTI Jakarta 23
- Andrian Sutedi,2006.*Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*,.Sinar Grafika:Jakarta.
- A.P Perlindungan,1998.*Komentaris atas Undang-Undang Pokok Agraria 2 UUPA*,Mandar maju:Bandung
- Bagir Manan,1999.*Beberapa Catatan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi* , FH-UNPAD:Bandung
- Bernard,Limbong,Bernard.2011,*PengadaanTanah Untuk Pembangunan* Margaretha Pustaka:Jakarta
- H.Idham,2004.*Konsolidasi tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Cetakan 1,Alumni:Bandung
- Iman,Sudiyat.1982,*Berbagai Masalah Pengadaan Tanah di Berbagai Masyarakat sedang Berkembang*.Yogyakarta: Liberty.
- Maria,Sumardjono,.2001, *Kebijakan Pertanahan*.Xompas:Jakarta
- Mohammad Hatta,1977,*Penjabaran Pasal 3 Undang-undang Dasar 1945*, Mutiara Pustaka:Jakarta
- Mudakir, 2004,“*Model Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di DKI Jakarta*” dalam media jaya No. 006 Th XXVIII Juli 2004.
- Rusmadi,Murad,2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Mandir,Alumni:Bandung

Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Kepentingan Umum*, Graha Ilmu: Mataram. 2007. *hukum pembebasan Hal Milik Adat Untuk Pembangunan*. Graha Ilmu: Mataram

_____, 2006, *implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Penguasaan Tanah untuk Pembangunan*, (Sinar Grafika: Jakarta)

Tatit Januar Habibi. 2007, *Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu* (Tesis), Universitas Diponegoro. Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria..

Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (yang telah dimodifikasi dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2000 – 2010).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keppres tanggal 17 Juni 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 92 Tahun 2003 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tahun 2004.

Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sepadan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang tahun 2000 – 2010.

Keputusan Walikota Semarang No. 590.05/40 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Semarang.

Keputusan Walikota Semarang No. 593/224 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Jatibarang, Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Drainase Perkotaan Seluas ± 223,58 Ha (Kurang Lebih Dua Ratus Duapuluh Tiga Koma Limapuluh Delapan Hektar) Terletak di Kelurahan Kandri, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati dan

C. Jurnal dan Majalah Hukum

Abdurrahman.1997.*Beberapa Aspek Hukum Tentang Masalah Pembebasan Tanah Dalam Pelaksanaan Pembangunan* , Majalah Orientasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Th II No. 4/1997

Majalah Hukum Nasional, Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departement Kahakiman No. 1 Tahun 1978

D. Internet

<http://linasouiiia.wordpress.com/2012/03/28/makalah-hukum->

<http://rheyndiaz2.blogspot.com/2012/10/makalah-pengadaan-tanah-untuk.html>/diakses pada09/12/2014/16.17

<http://elva-falasefa.blogspot.com/2013/04/alih-fungsi-lahan-elva-n-klp.html>.diakses pada09/12/2014/14.26

<http://Profsvamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>diakses pada09/12/2014/14.36

<http://hukum.kompasiana.com/2010/07/04/hak-milik-atas-tanah-184586.html>/diakses pada tanggal 9/12/2014/14.19

<http://forumpenilai publik.blogspot.com/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam-7.html> diakses pada09/12/2014/14.58

<http://elva-falasefa.blogspot.com/2013/04/alih-fungsi-lahan-elva-n-klp.html> pada09/12/2014/14.26

<http://rheyndiaz2.blogspot.com/2012/10/makalah-pengadaan-tanah-untuk.html>/diakses pada 09/12/2014/14.53

<http://ngobrolinhukum.com/2011/05/13/sekilas-pemikiran-mengenai-pengadaan-tanah-untuk-kepentinganumum-di-indonesia/27>
Januari.18.28

<https://maspurba.wordpress.com/2008/05/10/hak-menguasai-tanah-oleh-negara/27>.januari 2015.18.12